

PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Alfera Rahmawati¹, Iman Azril², Afifah Yoga Agustiana³, Johan Andriesgo⁴, Aini Gustia⁵, Mukhlisin⁶, Suri Eka Wahyuni⁷,

¹²³⁴⁵⁶⁷Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu, Indonesia

Email: Alferarahmawativovoy12i@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jkps.v10i2.473>

Sections Info

Article history:

Submitted: 23 April 2025

Final Revised: 11 March 2025

Accepted: 16 May 2025

Published: 15 June 2025

Keywords:

Principles

Financial Management

Islamic Perspective

Education



ABSTRAK

To realize quality education, one way is to optimize the school budget as a form of effective and efficient use of resources to support all aspects of school learning and development activities. The principle of school financial management is an important foundation in managing the flow of school finances to maintain the optimization of the use of funds so that they are right on target and achieve educational goals. The purpose of this study is to find out what are the principles of school financial management in the Islamic perspective. The research method used is a qualitative descriptive approach through library research, the results of the study show that there are several principles of financial management in the general view and in the Islamic perspective. In the general view there are six principles of financial management; 1. Justice, 2. Efficiency, 3. Effectiveness, 4. Transparency, 5. Accountability, and 6. Participation While in the Islamic view there are six 1. The principle of belief in the rules of Allah SWT, 2. The principle of Adl, 3. Amanah, 4. Sidiq, 5. Fatonah, and 6. Tabliq. These two Padangans have differences and similarities whose only difference lies in the Islamic orientation which is not only worldly, but also ukhrawi, thus making financial management a form of worship and trust in Allah SWT.

ABSTRAK

Untuk merealisasikan pendidikan bermutu, salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan anggaran sekolah sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien guna mendukung seluruh aspek kegiatan pembelajaran dan pengembangan sekolah. Prinsip Pengelolaan keuangan sekolah merupakan landasan penting dalam mengelola alur keuangan sekolah untuk menjaga pengoptimalan penggunaan dana sehingga tepat sasaran dan mencapai tujuan pendidikan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apa saja Prinsip pengelolaan keuangan sekolah dalam Perpektif Islam. metode penelitian yang digunakan adalah dengan penedekatan deskriptif kualitatif melalui library research, hasil penelitian menunjukkan ada beberapa Prinsip Pengelolaan keuangan dalam padangan Umum dan dalam perspektif islam. Dalam Padang umum ada enam prinsip pengelolaan keuangan; 1.Keadilan, 2. Efisiensi, 3. Efektif, 4. Tranparansi, 5. Akuntabelita, dan 6. Partisipasi Sedangkan dalam Padangan islam ada enam 1.Prinsip keyakinan pada aturan Allah SWT, 2.Prinsip Adl, 3.Amanah, 4.Sidiq, 5.Fatonah, dan 6.Tabliq. Kedua Padangan ini memiliki perbedaan dan persamaan yang menjadi pembedannya hanyalah terletak pada orientasi Islam yang tidak hanya duniawi, tetapi juga ukhrawi, sehingga menjadikan pengelolaan keuangan sebagai bentuk ibadah dan amanah kepada Allah SWT.

Kata Kunci: Prinsip, Pengelolaan Keuangan, Perspektif Islam, Pendidikan

PENDAHULUAN

Agar tujuan pendidikan yang berkualitas dapat tercapai, sekolah harus mampu mengelola keuangan dengan baik dan bertanggung jawab. Manajemen keuangan yang tepat di lingkungan sekolah merupakan kunci penting dalam mencapai tujuan pendidikan (Rahayu, 2019). Untuk merealisasi pendidikan bermutu, salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan anggaran sekolah sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien guna mendukung seluruh aspek kegiatan pembelajaran dan pengembangan sekolah. Agar hal ini dapat dijalankan secara baik maka sekolah perlu memiliki asas atau dasar pegangan yang jelas dalam pengelolaan keuangan. Asas tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan, menggunakan, serta mempertanggungjawabkan dana secara transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, setiap pengeluaran akan selaras dengan tujuan pendidikan serta menjamin keberlangsungan dan kualitas proses belajar-mengajar.

Di Indonesia, prinsip pengelolaan keuangan sekolah tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya pada Pasal 48. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus didasarkan pada empat prinsip utama, yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. (Jasmine, 2023) Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa dana pendidikan digunakan secara tepat sasaran, merata, dan bertanggung jawab, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dengan penerapan prinsip tersebut, sekolah diharapkan mampu mengelola keuangan secara profesional dan integratif, serta melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah, dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran.

Untuk memperkuat implementasi pengelolaan keuangan sekolah secara optimal, Islam juga memberikan pedoman prinsip-prinsip pengelolaan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam ajaran Islam, setiap individu dipandang sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola segala bentuk amanah, termasuk harta dan sumber daya, secara adil, bijaksana, dan bertanggung jawab. Tanggung jawab ini tidak dapat dijalankan secara sembarangan, melainkan harus didasari oleh ilmu pengetahuan yang memadai agar setiap keputusan dan tindakan dalam pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara duniawi maupun ukhrawi. Dengan demikian, pengelolaan keuangan dalam perspektif Islam bukan hanya sekadar aspek teknis, melainkan juga mencakup dimensi moral dan spiritual yang bertujuan untuk mencapai keberkahan, keadilan sosial, serta kemaslahatan umat secara keseluruhan (Najihah & Muhammad, 2021).

Dalam realitasnya, kajian tentang pengelolaan keuangan sekolah dari perspektif Islam masih relatif terbatas dan belum banyak diintegrasikan secara sistematis dalam praktik manajerial sekolah, khususnya di lembaga pendidikan umum. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menggali prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan sekolah menurut perspektif Islam, serta mengeksplorasi bagaimana penerapan prinsip tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan sumber kajian berasal dari berbagai artikel jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan literatur lain yang relevan dengan topik manajemen keuangan di lembaga pendidikan Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali prinsip-prinsip manajemen keuangan dalam perspektif

Islam yang diterapkan di lingkungan lembaga pendidikan, serta memahami praktik pengelolaan keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan ajaran Islam. Menurut Moleong, penelitian kualitatif memberikan gambaran secara mendalam dan holistik tentang suatu fenomena. Oleh karena itu, data dikumpulkan dan dianalisis melalui studi pustaka, pengelompokan informasi berdasarkan tema yang ditemukan, serta penyusunan ulang data sesuai dengan kategori prinsip-prinsip manajemen keuangan yang teridentifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Pengelolaan Keuangan Sekolah

Pengelolaan keuangan di sekolah merupakan elemen integral yang tak terpisahkan dari keseluruhan sistem manajemen keuangan (Kadir, 2019). Menurut Departemen Pendidikan Nasional, manajemen keuangan adalah proses pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup kegiatan pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Oleh karena itu, manajemen keuangan di lingkungan lembaga pendidikan atau sekolah dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola keuangan, mulai dari tahap perencanaan, pembukuan, pengeluaran dana, pengawasan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan secara menyeluruh (Hastuti & Fitriani, 2024).

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan akuntabel. Di tengah tuntutan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik terhadap lembaga pendidikan, sekolah dituntut mampu mengelola dana yang tersedia secara tepat guna dan bertanggung jawab. Baik dana berasal dari pemerintah, masyarakat, maupun sumber lainnya, seluruhnya harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik.

Untuk menjaga pengoptimalan anggaran sekolah maka Prinsip Pengelolaan Keuangan sekolah juga sudah diatur Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 48, tentang pengelolaan dana pendidikan harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip-prinsip ini sangat penting agar dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, atau sumber lain digunakan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik dan sekolah. Adapun pembahasan berikut akan menguraikan secara rinci prinsip keuangan sekolah (Rahmah, 2016):

1. Keadilan

Dalam konteks pengelolaan keuangan, prinsip keadilan menuntut agar setiap keputusan keuangan diambil secara adil, tanpa keberpihakan, dan dengan mempertimbangkan hak serta kepentingan semua pemangku kepentingan secara setara. Keadilan di sini berarti bahwa distribusi sumber daya harus mencerminkan kebutuhan yang nyata, bukan didasarkan pada kekuasaan, kedekatan, atau kepentingan pribadi (Aryawati et al., 2023). Dalam konteks organisasi yang bergerak dilayanan publik, seperti insitusi pendidikan Prinsip ini sangat krusial bagi organisasi karena bertujuan untuk menjamin bahwa tidak ada pihak yang terpinggirkan dalam memperoleh hak atas pendidikan. Oleh karena itu, sistem pengelolaan keuangan disusun sedemikian rupa guna mendukung tercapainya pemerataan akses terhadap layanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat (Usman, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1, prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan sekolah diwujudkan melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada calon maupun peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan. Bentuk kesempatan tersebut mencakup, antara

lain:

a. Penyediaan layanan khusus bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus serta mereka yang berbakat dan memiliki kecerdasan istimewa. Prinsip keadilan menuntut agar sekolah tidak hanya memberikan layanan standar, tetapi juga menyesuaikan pendekatan pembelajaran dan dukungan sesuai dengan karakteristik peserta didik.

1. Untuk siswa berkebutuhan khusus, sekolah perlu menyediakan fasilitas fisik yang ramah disabilitas (seperti aksesibilitas kursi roda, ruang kelas inklusif), tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus, serta program pembelajaran individual yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Untuk siswa berbakat dan berpotensi tinggi, sekolah dapat menyediakan program pengayaan, kelas akselerasi, pelatihan keterampilan khusus, atau kegiatan ekstrakurikuler yang menantang untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal.

Langkah-langkah ini bertujuan agar tidak ada siswa yang terabaikan hanya karena kebutuhan atau kemampuannya berbeda dari mayoritas.

b. Pemberian akses pendidikan yang merata kepada seluruh calon dan peserta didik. Keadilan dalam akses berarti setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, geografis, atau budaya, memiliki kesempatan yang sama untuk masuk dan mengikuti pendidikan di sekolah.

1. Sekolah harus berupaya menghapus hambatan seperti biaya masuk yang tinggi, jarak tempuh yang jauh, atau keterbatasan informasi yang dialami oleh kelompok marginal.

2. Bentuk konkret dari prinsip ini meliputi: penyediaan beasiswa atau pembebasan biaya untuk siswa tidak mampu, pengadaan transportasi sekolah di daerah terpencil, serta sosialisasi aktif ke masyarakat untuk menjangkau anak-anak putus sekolah.

Dengan cara ini, keadilan diukur bukan hanya dari tersedia tidaknya pendidikan, tapi juga sejauh mana pendidikan itu bisa diakses oleh semua kalangan.

c. Penyediaan peluang yang adil untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Prinsip keadilan menuntut agar tidak ada diskriminasi atau hambatan yang tidak adil bagi peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

1. Sekolah dan pemerintah perlu memastikan bahwa siswa dari berbagai latar belakang memiliki akses yang sama terhadap informasi, bimbingan, dan dukungan finansial yang dibutuhkan untuk melanjutkan studi.

2. Ini dapat diwujudkan melalui program bimbingan karier, bantuan biaya pendidikan lanjutan, kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi, atau jalur khusus bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.

Dengan demikian, siswa memiliki peluang yang seimbang untuk tumbuh dan berkembang, tanpa terkendala oleh kondisi ekonomi, status sosial, atau lokasi geografis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam manajemen keuangan pendidikan adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang dimiliki dialokasikan secara adil, sehingga seluruh warga sekolah memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh manfaat dari layanan pendidikan (Aziz et al., 2023).

2. Efisiensi

Efisiensi merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan keluaran (output) yang optimal dengan penggunaan sumber daya atau masukan (input) seminimal mungkin. Dengan kata lain, efisiensi adalah perbandingan yang paling tepat antara apa yang dikeluarkan (biaya, waktu, tenaga) dan apa yang dihasilkan (produk, layanan, manfaat). (Majid, 2023)

Efisiensi dalam pendidikan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pendidikan yang terbatas secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Artinya, bagaimana sekolah atau lembaga pendidikan mampu menggunakan dana, tenaga, waktu, dan sarana prasarana seefektif mungkin agar tujuan pendidikan tercapai secara optimal. Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam pembiayaan pendidikan, sering digunakan metode efektivitas biaya (*cost effectiveness method*). Metode ini membantu menilai sejauh mana setiap komponen input pendidikan seperti guru, fasilitas, materi pembelajaran, dan waktu belajar memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian hasil pendidikan, seperti peningkatan prestasi belajar siswa atau keberhasilan mencapai kompetensi yang ditargetkan (DR HA Rusdiana, 2021).

Dengan kata lain, efisiensi biaya pendidikan tidak hanya dinilai dari seberapa kecil pengeluaran yang dilakukan, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan mampu menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Efisiensi bukan sekadar menghemat, melainkan memastikan bahwa seluruh alokasi dana benar-benar digunakan untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah terhadap mutu pendidikan.

Efisiensi keuangan sekola Menurut Rizal hidayat ddk.. bahwa

1. analisis situasi keuangan

Menurut Jasmine menganalisis biaya keuangan sekolah merupakan cara alternatif untuk mencapai tujuan (Jasmine, 2023). Melakukan analisis terhadap kondisi keuangan sekolah secara menyeluruh merupakan langkah penting dalam menyusun neraca keuangan yang akurat dan informatif. Neraca ini akan menjadi dasar untuk merancang dan mengembangkan strategi keuangan secara lebih terarah, baik untuk kebutuhan pengeluaran rutin seperti gaji, operasional, dan pemeliharaan, maupun untuk pengeluaran non-rutin seperti pengadaan sarana baru, renovasi, atau kegiatan pengembangan sekolah. Dengan pemetaan keuangan yang jelas, manajemen sekolah dapat lebih mudah menetapkan skala prioritas, menghindari pemborosan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan keuangan mendukung pencapaian tujuan pendidikan jangka pendek dan jangka panjang.

2. Mengidentifikasi resiko (Hidayat et al., 2023)

Dengan mengenali berbagai potensi risiko keuangan, lembaga pendidikan dapat menyusun strategi yang tepat untuk mengelola serta meminimalkan dampak yang merugikan. Pengelolaan risiko keuangan yang terstruktur tidak hanya menjaga kestabilan finansial sekolah, tetapi juga menjadi dasar dalam menerapkan berbagai trik efisiensi anggaran. Misalnya, melalui identifikasi risiko pemborosan atau ketidaktepatan alokasi dana, sekolah dapat lebih cermat dalam menyusun anggaran yang berorientasi pada prioritas pendidikan (Afkari, 2025).

3. Optimalisasi Sumber Daya

Menurut pandangan Murnane dan Levy, pemanfaatan sumber daya yang ada secara

optimal merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Pandangan ini diperkuat oleh Hanushek yang menegaskan bahwa distribusi sumber daya yang tepat—terutama dalam aspek keuangan dan tenaga pendidik—dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dalam konteks pengelolaan dana sekolah, hal ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak hanya sekadar penghematan, tetapi lebih pada bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian hasil belajar. Dengan pengelolaan dana yang efisien dan terarah, sekolah dapat memastikan bahwa investasi pendidikan digunakan secara tepat guna, tepat sasaran, dan mendukung peningkatan kualitas secara berkelanjutan (Ahyani & Dhuhani, 2024)

4. Pemanfaatan Teknologi

Menurut Tri Zahra: Pemanfaatan teknologi informasi menjadikan pekerjaan lebih efisien dan efektif karena mampu menyederhanakan proses penyelesaian berbagai tugas, termasuk dalam pengelolaan administrasi keuangan. Dalam konteks sekolah, teknologi informasi berperan penting dalam mempercepat dan mempermudah penyusunan laporan keuangan serta laporan operasional lainnya. Salah satu contohnya adalah penggunaan aplikasi BOS Online yang memungkinkan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dilakukan secara transparan, akurat, dan tepat waktu. Dengan sistem digital ini, sekolah dapat meminimalkan kesalahan input data, menghemat waktu kerja, dan mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual, yang pada akhirnya berkontribusi pada efisiensi penggunaan dana pendidikan secara keseluruhan (Sumarsono et al., 2021).

5. Penerapan Monitoring dan evaluasi

Penerapan sistem monitoring dan evaluasi (monev) berperan sebagai instrumen penting untuk mendukung perencanaan anggaran yang lebih terarah. Dengan memilih serta menggunakan indikator yang tepat dalam sistem monev, tujuan dan arah pelaksanaan program dapat lebih jelas dan terukur. Hal ini sejalan dengan temuan dari Pani dan rekan-rekan yang menunjukkan bahwa sistem monev yang berjalan dengan baik memungkinkan pelaksana kebijakan untuk memantau perkembangan, mengidentifikasi hambatan, serta mengantisipasi kendala yang tidak terduga. Dalam konteks efisiensi pengelolaan keuangan sekolah, sistem monev yang kuat membantu memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal, tepat sasaran, dan memastikan tidak ada pemborosan atau penyalahgunaan dana sekolah (Tuu et al., 2024).

3. Efektivitas

Efektivitas sering diartikan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, Garner Manifence menekankan bahwa efektivitas memiliki makna yang lebih luas, yakni tidak hanya sekadar mencapai tujuan, tetapi juga mencerminkan kualitas hasil yang dicapai dalam hubungannya dengan visi institusi. Dengan demikian, efektivitas lebih berfokus pada mutu hasil akhir (outcomes) yang mendukung tercapainya tujuan jangka panjang lembaga (Sihotang & Yutanto, 2021).

Terdapat beberapa indikator dalam efektivitas manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan Efektivitas manajemen keuangan dan pembiayaan dalam dunia pendidikan dapat diukur melalui beberapa indikator utama, 1). Adanya Input melalui karakteristik sumber biaya pendidikan, 2). Adanya proses yaitu meliputi perilaku administratif, bendaharawan dalam alokasi sumber dana, 3). Adanya proses yaitu meliputi perilaku administratif, bendaharawan dalam alokasi sumber dana, 4). output, hasil-hasil dalam bentuk prestasi belajar, perubahan sikap, keadilan dan persamaan

(Komariah et al., 2023) Berikut akan dijelaskan secara rinci:

1. Adanya Input melalui karakteristik sumber biaya pendidikan

Input dalam pendidikan adalah segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem pendidikan untuk menghasilkan hasil (output) seperti lulusan yang berkualitas. Salah satu input penting adalah biaya pendidikan, yaitu dana yang dibutuhkan agar proses belajar-mengajar bisa berjalan dengan baik. Karakteristik sumber biaya pendidikan berarti kita melihat dari mana saja dana atau biaya pendidikan itu berasal, dan bagaimana sifat atau ciri-ciri dana tersebut. Ini penting karena sumber dana yang berbeda bisa mempengaruhi kualitas pendidikan. Ini merujuk pada asal-usul dana pendidikan. Sumber-sumber bisa berasal dari: Pemerintah (misalnya APBN/APBD), Masyarakat (Jariyah), dan Orang Tua (SPP)

Sumber dana pendidikan juga diatur melalui undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 dan ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2003 pada XIII bagian kedua tentang sumber pendanaan pendidikan pasal 47 dijelaskan mengenai sumber pendanaan pendidikan: 1). sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan kecukupan dan keberlanjutan 2) pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat mengarahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3). ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagai warga masyarakat dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (Sudaryo, 2024)

Masing-masing sumber ini memiliki karakteristik berbeda, misalnya dari segi jumlah, tujuan penggunaannya, frekuensi pencairan, serta aturan atau batasan penggunaannya. Memahami karakteristik ini penting agar sekolah bisa merencanakan dan menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku. Dengan mengetahui karakteristik tiap sumber dana, sekolah dapat mengalokasikan dan memanfaatkan anggaran secara cermat dan tidak tumpang tindih. Misalnya, dana dari pemerintah dapat difokuskan untuk operasional dan sarana prasarana, sementara dukungan dari masyarakat bisa diarahkan untuk kegiatan tambahan seperti ekstrakurikuler. Dengan begitu, setiap sumber dana dimaksimalkan sesuai fungsinya, sehingga hasil pendidikan lebih optimal dan tidak ada pemborosan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah telah dilakukan secara efektif.

2. Adanya proses yaitu meliputi perilaku administratif, bendaharawan dalam alokasi sumber dana.

Proses dalam pengelolaan keuangan sekolah mencakup aktivitas administratif dan peran bendaharawan dalam mengalokasikan sumber dana yang tersedia. Proses ini sangat penting karena menjadi jembatan antara perencanaan anggaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Perilaku administratif merujuk pada tindakan manajerial seperti penyusunan rencana anggaran, pencatatan keuangan, pengawasan penggunaan dana, hingga pelaporan keuangan yang transparan. Sementara itu, bendaharawan memiliki peran teknis dalam menerima, menyimpan, mencairkan, dan mencatat penggunaan dana secara tepat dan akurat. Kedua peran ini harus berjalan selaras agar pengelolaan keuangan sekolah berjalan efektif.

Efektivitas pengelolaan keuangan sekolah mengacu pada sejauh mana dana yang tersedia digunakan secara optimal untuk mendukung proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Proses pengelolaan yang baik akan mencerminkan prinsip-prinsip efektivitas, seperti tepat sasaran, efisien, transparan, dan akuntabel. Misalnya, dana yang telah dialokasikan untuk kegiatan pembelajaran harus benar-benar digunakan untuk keperluan tersebut, bukan disalahgunakan atau dialihkan

tanpa alasan jelas

3. output, hasil-hasil dalam bentuk prestasi belajar, perubahan sikap, keadilan dan persamaan.

Output pendidikan adalah hasil dari proses belajar-mengajar yang bisa digunakan untuk menilai apakah program pendidikan berjalan dengan baik atau tidak. Hasil ini menjadi tolak ukur keberhasilan, apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau belum (Iman et al., 2024). Hubungan antara output ini dengan prinsip efektivitas dalam pengelolaan keuangan sekolah sangat erat. Efektivitas keuangan berarti bahwa dana yang dikeluarkan harus memberikan hasil nyata yang sejalan dengan tujuan pendidikan. Ketika alokasi anggaran tepat dan penggunaannya sesuai prioritas, misalnya untuk peningkatan kualitas pengajaran, bantuan bagi siswa kurang mampu, atau perbaikan lingkungan belajar maka output seperti meningkatnya prestasi, terbentuknya karakter positif siswa, dan terwujudnya kesetaraan pendidikan akan terlihat. Sebaliknya, jika dana tidak digunakan dengan efektif atau tidak sesuai prioritas, maka output tersebut tidak akan tercapai meskipun dana tersedia. Oleh karena itu, output menjadi salah satu indikator kunci dalam menilai apakah pengelolaan keuangan sekolah benar-benar efektif dalam mendukung kemajuan pendidikan.

4. Outcome, meliputi jumlah lulusan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi

Outcome dalam konteks pendidikan adalah dampak jangka panjang dari proses dan hasil pendidikan, salah satunya terlihat dari jumlah lulusan yang berhasil melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa pendidikan yang diberikan tidak hanya berhasil dalam jangka pendek (seperti nilai atau sikap siswa), tetapi juga membawa manfaat nyata dalam kehidupan siswa ke depan. Misalnya, jika banyak lulusan sekolah dasar yang dapat melanjutkan ke SMP, atau siswa SMP yang masuk ke SMA favorit, maka itu menunjukkan keberhasilan pendidikan dalam jangka panjang. Hal ini sangat berkaitan dengan prinsip efektivitas dalam pengelolaan keuangan sekolah. Efektif berarti dana yang digunakan benar-benar memberi dampak nyata dan bermanfaat. Jika keuangan sekolah dikelola dengan baik—misalnya, digunakan untuk meningkatkan kualitas pengajaran, menyediakan beasiswa, memperbaiki fasilitas belajar—maka siswa akan lebih siap menghadapi ujian dan melanjutkan pendidikan. Sebaliknya, jika dana tidak digunakan secara tepat sasaran, maka peluang siswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bisa menurun. Jadi, outcome menjadi bukti akhir bahwa pengelolaan dana sekolah telah memberikan hasil yang efektif dalam mendukung keberlanjutan pendidikan siswa.

4. Transparansi

Menurut Badudu dan Zain, transparansi diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan kejernihan, kejelasan, dan keterbukaan yang tidak bersifat eksklusif bagi kelompok tertentu. Artinya, informasi harus dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan tanpa adanya batasan yang tidak wajar. Dalam konteks pengelolaan keuangan, transparansi mencakup penyampaian informasi secara terbuka mengenai kondisi keuangan, penggunaan dana, serta keputusan-keputusan strategis yang berkaitan dengan anggaran. Informasi tersebut harus disajikan dengan jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan regulasi serta standar akuntabilitas yang berlaku. Dengan adanya transparansi, maka akan tercipta kepercayaan dari berbagai pihak. Hal ini juga menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan anggaran dan memastikan bahwa seluruh dana benar-benar digunakan untuk kepentingan secara optimal (Ritonga, 2024). Dalam lembaga pendidikan, manajemen keuangan yang bersifat

transparan mengindikasikan adanya keterbukaan dalam pengelolaan seluruh aspek keuangan lembaga. (Rianti, 2025) Bentuk Transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah:

a. Keterlibatan Stakeholder pengelolaan keuangan sekolah

Keterlibatan stakeholder, seperti kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat, sangat penting dalam pengelolaan keuangan sekolah. Pelibatan ini mencerminkan prinsip partisipatif dan berkaitan erat dengan prinsip transparansi, yaitu keterbukaan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan dana. Dengan melibatkan stakeholder, sekolah menunjukkan pengelolaan keuangan yang terbuka dan dapat dipercaya, sehingga meningkatkan kepercayaan publik

b. Memerlukan dokumentasikan dan adanya komunikasi yang baik

Dalam pengelolaan keuangan sekolah, dokumentasi dan komunikasi yang baik sangat diperlukan untuk mendukung prinsip transparansi. Dokumentasi yang lengkap, seperti laporan anggaran, bukti pengeluaran, dan notulen rapat, menjadi bukti nyata atas setiap penggunaan dana. Sementara itu, komunikasi yang terbuka antara pihak sekolah dan stakeholder memastikan bahwa informasi keuangan tersampaikan secara jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Keduanya dokumentasi dan komunikasi membantu menciptakan pengelolaan yang jujur, terbuka, serta dapat diawasi bersama, sesuai dengan prinsip transparansi.

c. Penggunaan Teknologi

Penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan sekolah, seperti aplikasi sistem informasi keuangan atau platform digital, dapat meningkatkan transparansi. Melalui teknologi, data keuangan dapat dicatat, dipantau, dan dilaporkan secara lebih cepat, akurat, dan terbuka. Informasi anggaran dan realisasi penggunaan dana dapat diakses oleh stakeholder kapan saja, sehingga memudahkan pengawasan dan akuntabilitas. Dengan demikian, teknologi mendukung prinsip transparansi melalui keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi semua pihak yang berkepentingan (Salam, 2024). Aplikasi RKAS merupakan sistem informasi dan komunikasi yang dirancang untuk mendukung proses penyusunan anggaran, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah secara nasional. Penggunaan aplikasi ini sejalan dengan prinsip transparansi karena memungkinkan setiap tahap pengelolaan dana tercatat secara sistematis dan dapat diakses serta diawasi oleh pihak terkait, sehingga mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah (Diantari et al., 2024).

d. Kepercayaan dan kerjasama bersama Stakeholder

Ketika pengelolaan dana dilakukan secara terbuka, orang tua dan masyarakat akan lebih yakin bahwa sekolah menggunakan anggaran secara bijaksana dan bertanggung jawab. Keterbukaan ini mencerminkan penerapan prinsip transparansi, yang pada akhirnya membangun kepercayaan publik. Kepercayaan tersebut sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, di mana seluruh pihak merasa terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung proses belajar mengajar

e. Meminimalisir Penyalahgunaan dana

Dengan adanya keterbukaan, setiap stakeholder memiliki kesempatan untuk memantau penggunaan dana serta memberikan masukan atau koreksi bila diperlukan. Kepala sekolah bersama tim dapat secara rutin melakukan evaluasi bersama guna memastikan bahwa pengelolaan dana berjalan sesuai dengan rencana

dan peraturan yang berlaku.

5. Akuntabel

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas setiap kegiatan yang dilaksanakan. Artinya, semua tindakan dan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik (Abdillah, 2024). Akuntabilitas merupakan salah satu aktivitas terpenting dalam sistem pengelolaan keuangan. Prinsip akuntabilitas menyatakan bahwa penggunaan dana pendidikan harus mengikuti rencana yang ditentukan dan dapat ditelusuri. Sekolah bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut, dengan memperhatikan rencana yang dikembangkan dan peraturan yang berlaku. Pertanggung jawaban ini kepada masyarakat, orang tua siswa, dan pemerintah (Nisa et al., 2024).

a. Transparansi

Adanya transparansi penyelenggara sekolah yang terbuka terhadap masukan dan melibatkan berbagai komponen dalam pengelolaan menunjukkan penerapan prinsip akuntabilitas. Hal ini mencerminkan tanggung jawab sekolah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya kepada semua pihak terkait. Dengan transparansi dan partisipasi, pengelolaan sekolah menjadi lebih terbuka, dapat diawasi, serta mendorong terciptanya kepercayaan dan perbaikan berkelanjutan.

b. Standar Kinerja

Adanya standar kinerja di setiap institusi memungkinkan tugas, fungsi, dan wewenang dilaksanakan secara terukur dan objektif. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas, karena melalui standar kinerja, institusi dapat menunjukkan sejauh mana tanggung jawabnya telah dijalankan secara efektif dan efisien. Standar ini menjadi tolok ukur untuk menilai keberhasilan, memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

c. Transparansi

karena partisipasi memungkinkan masyarakat ikut berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan publik.

Melalui keterlibatan aktif ini, penyelenggara layanan dituntut untuk bertindak terbuka, responsif, dan bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Dengan demikian, akuntabilitas tercipta karena ada mekanisme kontrol sosial yang mendorong pelayanan menjadi lebih transparan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Rahayuningsih, 2021).

6. Partisipasi

Prinsip Partisipasi dalam pengelolaan keuangan itu sangat penting seperti pendapat Rusdiana dalam bukunya *Manajemen Keuangan Sekolah: Konsep Prinsip dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah* menyebutkan dalam pengelolaan keuangan sekolah perlu adanya Penguatan Partisipasi Publik atau masyarakat. Keterlibatan aktif komite sekolah dan masyarakat bukan sekadar formalitas, melainkan bagian integral dari proses pengambilan keputusan yang transparan dan inklusif. Kepala sekolah perlu membuka ruang partisipatif dengan melibatkan komite sekolah secara bermakna dalam penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi penggunaan dana. Forum

musyawarah, rapat terbuka, serta pelaporan periodik dapat menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi, memberikan masukan, dan melakukan pemantauan bersama. Dengan mengedepankan prinsip partisipasi, setiap keputusan terkait keuangan sekolah mencerminkan kebutuhan riil dan kepentingan bersama, serta memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif di antara seluruh pemangku kepentingan.

B. Prinsip Pengelolaan Keuangan Sekolah Dalam Perspektif Islam

Dalam islam, manusia harus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai khalifah dengan sebaikbaiknya. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, manusia harus memiliki suatu ilmu. Oleh karena itu, pengelola keuangan harus memiliki prinsip kerja sama dan keadilan (Najihah & Muhammad, 2021). Pengelolaan keuangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu keadilan, transparansi, laeangan riba (bunga), gharar (ketidak pastian), dan mendorong investasi yang halal dan bermanfaat. Pengelolaan keuangan dalam islam ini harus menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta menegakkan nilai-nilai etika dan moral islam. Dalam firmanNya yang berbunyi :

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

artinya : *Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.*

Ayat ini menegaskan larangan pemborosan (tabdzir) dan menganjurkan alokasi dana kepada yang berhak. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, hal ini menuntut pengelola untuk menggunakan dana pendidikan dengan efisien, transparan, dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan dana harus diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, bukan untuk hal yang sia-sia atau berlebihan (Untung, 2023). Prinsip pengelolaan keuangan dalam perspektif Islam didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi dan keuangan. Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam manajemen keuangan Islam:

1. Keyakinan Pada Aturan Allah SWT

Keyakinan pada aturan Allah SWT mengajarkan bahwa manusia diciptakan untuk menaati semua perintah-Nya, yang mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya ibadah, tetapi juga urusan ekonomi dan keuangan. Dalam konteks pengelolaan keuangan sekolah, keyakinan ini menuntut agar setiap pengelolaan dana dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Setiawan, 2021). Karena manusia memiliki keterbatasan dalam menentukan kebenaran, maka pedoman Allah menjadi landasan utama agar pengelolaan keuangan sekolah berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam, membawa keberkahan, serta memberi manfaat bagi seluruh warga sekolah. (Fadhilah, 2023) Salah satu aturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan syariah islam itu banyak namun ada Larangan utama dalam Islam terkait transaksi keuangan yang membedakan keuangan Islam dari Keuangan konvensional, yaitu sebagai berikut:

a. Larangan Riba

Larangan riba dalam pengelolaan keuangan sekolah berarti bahwa setiap aktivitas keuangan di lingkungan sekolah harus bebas dari unsur bunga atau tambahan yang bersifat tidak adil, sebagaimana dilarang dalam ajaran Islam. Riba dilarang karena mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak.

b. Larangan Ketidakpastian (Gharar)

Secara bahasa, gharar berarti penipuan, namun juga mencakup makna risiko, ketidakpastian, dan keraguan dalam suatu transaksi. Konsep gharar terbagi dua: pertama, mengandung unsur ketidakpastian atau kemungkinan yang belum jelas; kedua, berkaitan dengan tindakan merugikan atau penipuan oleh satu pihak terhadap pihak lain. Dalam pengelolaan keuangan sekolah, gharar harus dihindari dengan memastikan setiap transaksi keuangan dilakukan secara transparan, jelas, dan tanpa unsur spekulasi atau ketidakpastian, agar tidak menimbulkan kerugian dan tetap sesuai dengan prinsip keuangan syariah.

c. Larangan Spekulatif (Maysir)

Maysir atau qimar (perjudian) adalah segala bentuk pertarungan yang melibatkan unsur untung-untungan, di mana satu pihak memperoleh keuntungan sementara pihak lain mengalami kerugian. Dalam pengelolaan keuangan sekolah, prinsip ini menegaskan larangan keras terhadap penggunaan dana sekolah untuk kegiatan spekulatif atau berisiko tinggi, seperti investasi tidak jelas, arisan berhadiah, atau sistem undian berbayar. Dana sekolah harus dikelola secara aman, transparan, dan sesuai tujuan pendidikan, agar terhindar dari unsur perjudian yang bertentangan dengan prinsip keuangan syariah dan dapat merugikan lembaga maupun peserta didik.

d. Berbagi Risiko dan Keuntungan (Profit and Loss Sharing)

Berbagi Risiko dan Keuntungan (Profit and Loss Sharing) adalah konsep dalam ekonomi Islam di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu kerja sama berbagi secara adil terhadap hasil usaha, baik untung maupun rugi. Dalam konteks pengelolaan keuangan sekolah, prinsip ini dapat diterapkan dalam kerja sama antara sekolah dan pihak ketiga, seperti koperasi, mitra usaha, atau penyedia layanan pendidikan. Artinya, jika ada kerja sama yang menghasilkan pendapatan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang adil. Sebaliknya, jika terjadi kerugian, semua pihak juga ikut menanggung secara proporsional. Hal ini mendorong kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap keputusan keuangan sekolah.

e. Etika Investasi Islam

Menurut Ahmad Amin, batasan etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk. Dalam pengelolaan keuangan sekolah, etika investasi Islam menjadi pedoman agar dana yang dimiliki sekolah, seperti dana BOS atau sumbangan masyarakat, tidak disalahgunakan atau ditempatkan dalam investasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jika sekolah ingin mengembangkan dana melalui kerja sama atau program produktif, maka harus dipastikan kegiatan tersebut halal, transparan, adil, dan bermanfaat bagi pendidikan. Dengan mengikuti etika investasi Islam, sekolah tidak hanya menjaga keberkahan dana, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab moral terhadap para stakeholder dan masyarakat.

2. Keadilan (Adl)

Keadilan atau *'adl* dalam bahasa Arab merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional dan tidak berbuat zalim. Dalam konteks pengelolaan keuangan sekolah, prinsip *'adl* berarti dana harus dikelola dan dialokasikan secara adil, merata, dan sesuai kebutuhan tanpa adanya penyalahgunaan atau keberpihakan yang tidak semestinya (Atmajaya et al., 2024). Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam Q.S. al-

An-'am ayat 152, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْفِئُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ

فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّتْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Yang artinya :

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat), sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, meskipun terhadap kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat."

3. Amanah

Dalam bahasa Arab, *amanah* merujuk pada segala bentuk tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada manusia untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab ini mencakup peran sebagai khalifah ilahi (*khilafah ilahiyah*), khalifah dalam penciptaan (*khilafah takwiniyah*), serta mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan dengan sesama manusia (*hablum minannas*). Ketika amanah tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan, maka akan membawa banyak kebaikan. Sebaliknya, pengkhianatan terhadap amanah atau kelalaian dalam menjalankannya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dan kerusakan (Deski, 2024).

Amanah merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan. Seorang pemimpin di lembaga pendidikan dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab keuangannya dengan integritas dan transparansi yang tinggi. Dalam perspektif Islam, amanah berarti kewajiban untuk menjaga serta mengelola aset atau harta dengan kejujuran dan keadilan yang penuh. Alquran menegaskan pentingnya amanah dalam surah Annisa ayat 58, Arinya: "*sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukuman di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*" (Sa'adah et al., 2025)

Surah An-Nisa ayat 58 menegaskan pentingnya menunaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan keputusan dengan adil. Dalam konteks pengelolaan keuangan sekolah, ayat ini menjadi landasan moral dan spiritual yang kuat bagi para pengelola dana pendidikan. Dana yang diterima dari pemerintah, donatur, atau masyarakat merupakan amanah yang harus dikelola dan disalurkan secara tepat kepada pihak-pihak yang berhak, seperti siswa, guru, dan kebutuhan operasional sekolah. Selain itu, pengambilan keputusan dalam penggunaan dana harus dilakukan secara adil dan bijaksana, tanpa unsur penyalahgunaan atau ketidaktransparanan. Dengan menjadikan nilai amanah dan keadilan sebagai pedoman, pengelolaan keuangan sekolah tidak hanya akan berjalan secara profesional, tetapi juga bernilai ibadah dan mencerminkan integritas Islami.

Pengelolaan yang berlandaskan pada prinsip amanah akan mendorong pelaksanaan tugas secara bertanggung jawab, tanpa kecerobohan atau tindakan sewenang-wenang. Hal ini sangat relevan dalam konteks pengelolaan keuangan sekolah, mengingat sumber dana yang digunakan sering kali berasal dari pemerintah, donatur, bantuan eksternal, atau masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan, akurat, dan rinci, sekolah berisiko kehilangan kepercayaan publik serta dapat mencoreng reputasi lembaga pendidikan tersebut. Prinsip amanah menuntut setiap pemimpin sekolah untuk menjaga integritas dalam

mengelola dana, agar keberlangsungan dan kredibilitas sekolah tetap terjaga (Abbas, 2015).

4. Jujur (Sidiqq)

Shiddiq berarti jujur atau kebenaran. Kejujuran ini tidak hanya tercermin dalam ucapan, tetapi juga dalam tindakan yang sesuai dengan apa yang dikatakan. Dengan kata lain, antara perkataan dan perbuatan harus selaras dan konsisten (Trisnawati et al., 2021). sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya : "Sesungguhnya kejujuran mengantarkan pada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan ke dalam surga. Seseorang yang selalu berusaha untuk jujur akan dicatat oleh Allah sebagai orang jujur dan jauhilah oleh kamu perbuatan dusta, karena dusta akan mengantarkan pada kejahatan. Dan kejahatan akan mengantar ke dalam neraka. Seorang yang selalu berdusta akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta."

Kejujuran merupakan dasar etika yang sangat penting dalam ajaran Islam dan harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dalam konteks ini, kejujuran mencakup keterbukaan dalam menyusun laporan keuangan, ketelitian dalam proses pembelian, serta transparansi dalam setiap transaksi keuangan yang melibatkan dana sekolah. Dengan menerapkan nilai kejujuran secara konsisten, pengelolaan keuangan sekolah dapat berjalan dengan akuntabel, membangun kepercayaan dari berbagai pihak seperti orang tua, donatur, dan masyarakat, serta menjaga integritas lembaga pendidikan itu sendiri (Anwar et al., 2023)

5. Fatonah

Secara umum, *fathonah* berarti cerdas atau memiliki kecerdasan. Sifat ini merupakan salah satu karakter mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yang mencerminkan kemampuan berpikir tajam, bijaksana, dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai situasi. (Zahroh & Ryandono, 2015) Dalam konteks pengelolaan keuangan sekolah, prinsip ini sangat relevan. Para pengelola keuangan sekolah perlu memiliki pemahaman yang baik terhadap tanggung jawab serta prosedur yang terkait dengan pengelolaan dana pendidikan.

Dalam perspektif akuntansi syariah, hal ini penting untuk mencegah kesalahan, memastikan keuangan dikelola secara profesional, dan menjaga amanah demi mendukung keberlangsungan serta kredibilitas lembaga pendidikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Jatziyah ayat 13: "Dan dia menunjukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir"

Ayat tersebut menegaskan bahwa kecerdasan dimiliki oleh manusia yang mau menggunakan dan mengembangkan akalunya dalam bekerja, selama tetap berada dalam batas-batas ajaran yang benar. Hal ini juga berlaku dalam pengelolaan keuangan sekolah. Para pengelola keuangan sekolah dituntut untuk menggunakan kecerdasannya secara bijak dalam menjalankan tugas, terutama dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan. Ketelitian dan kehati-hatian sangat diperlukan agar setiap transaksi keuangan tercatat dengan akurat, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan, termasuk nilai-nilai etika Islam. Dengan demikian, pengelolaan keuangan sekolah tidak hanya efisien, tetapi juga bernilai ibadah (Rahmatilla & Ali, 2024).

6. Tabliq

Tabligh berarti menyampaikan pesan atau ajakan kepada kebenaran, khususnya dalam hal aqidah tauhid. Secara umum, tabligh mencerminkan sifat komunikatif dan persuasif, yaitu kemampuan untuk menyampaikan ajaran agama secara jelas,

meyakinkan, dan penuh tanggung jawab kepada orang lain (Muchlis et al., 2022).

Prinsip *tabligh*, yaitu menyampaikan informasi secara jujur, terbuka, dan transparan, sangat penting dalam pengelolaan keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan menuntut keterbukaan penuh, pengelolaan keuangan sekolah juga harus menyampaikan semua informasi keuangan seperti sumber dana, alokasi, dan laporan penggunaan secara jelas kepada pihak-pihak terkait, seperti guru, orang tua, dan komite sekolah.

Dalam akuntansi syariah, transparansi ini merupakan bentuk kejujuran yang tidak boleh disembunyikan. Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam Surah Al-Maa'idah ayat 67 Artinya: *"Hai Rasulullah, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir"*.

Dalam konteks pengelolaan keuangan sekolah, ayat ini mengajarkan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti guru, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat. Menyembunyikan informasi keuangan atau tidak melaporkannya secara jujur berarti mengkhianati amanah yang telah dipercayakan. Maka, seperti halnya Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan seluruh wahyu, pengelola keuangan sekolah pun harus menyampaikan laporan keuangan secara lengkap dan benar, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual, sekaligus untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan.

Tabligh yang berarti komunikatif dan argumentatif serta menjunjung transparansi, juga sangat relevan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Seperti halnya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar yang menjaga komunikasi terbuka antara pimpinan dan staf melalui rapat rutin untuk membahas masalah dan anggaran, sekolah juga perlu menerapkan pola komunikasi serupa. Kepala sekolah bersama tim keuangan harus terbuka dalam menyampaikan informasi terkait penggunaan dana, anggaran tahunan, serta laporan keuangan kepada pihak internal dan eksternal, seperti guru, komite sekolah, dan orang tua. Transparansi ini tidak hanya mencerminkan sifat *tabligh*, tetapi juga membangun kepercayaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan.

C. Kaitan Prinsip pengelolaan keuangan perspektif umum dan islam

Dalam pandangan Islam, aktivitas bisnis dipahami bukan sekadar kegiatan ekonomi biasa, melainkan harus dilandasi oleh prinsip hubungan harmonis antara manusia dengan sesama, lingkungan, dan terutama dengan Allah SWT. Dengan landasan spiritual ini, setiap muslim yang terlibat dalam kegiatan bisnis maupun pengelolaan keuangan akan selalu merasa diawasi oleh kehadiran Tuhan dalam setiap langkahnya. Nilai-nilai ini bukan sekadar teori, melainkan harus menjadi jiwa dan pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi (Rambe & Herlambang, 2022).

Pengelolaan keuangan umum di Indonesia berlandaskan pada prinsip-prinsip dan asas yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang prinsip pengelolaan keuangan yang berpegang teguh pada tanggung jawab pada kepercayaan publik serta optimalisasi penggunaan dana. Inilah yang menjadi pembeda antara prinsip pengelolaan keuangan syariah dan umum. Berikut akan dijelaskan perbedaan dan persamaan prinsip pengelolaan keuangan umum dan Islam:

Aspek	Perspektif Umum	Perspektif Islam
Landasan	Keadilan, Efisiensi,	Keyakinan pada aturan

Filosofis	efektifitas, Transparansi, Akuntabelitas, Patisipasi	Allah SWT, Nilai-nilai Syariah: Adl, amanah, Sidiq, Fatonah, Tabliq.
Tujuan Utama	Meningkatkan mutu pendidikan dan Akuntabilitas Publik	Mencapai keberkahan, keadilan sosial, dan ridha Allah.
Akuntabilitas dan Transparansi	Wajib Bertanggung jawab dan Keterbuka dalam pengelolaan alur keuangan Kepada Steakholder	Selain bertanggung jawab kepada steakholder juga harus bertanggung jawab kepada Allah SWT. Transparasi dalam islam berarti harus memiliki nilai amanah, tabliq dan sidiq baik kepada manusia maupun sang Pencipta (Allah SWT)
Etika Penggunaan Keuangan	Berdasarkan hukum positif dan regulasi administratif.	Tidak boleh digunakan untuk hal haram, menghindari riba, Larangan gharar, dan Larangan Spekulatif (Maysir).
Efesiensi dan efektif	Hasil yang sesuai dengan biaya, waktu dan tenaga yang hemat. Dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Administator keuangan sekolah.	Efesiensi dan efektif dapat dihasilkan dari kecerdasan yang mana sama dengan prinsip keuangn syariah islam yaitu Fatonah (Cerdas) dengan kecerdasan semua pengelolaan keuangan dapat diekelola dengan baik dan dan sesuai ketentuan Allah Swt

KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan sekolah yang baik harus didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, efektivitas, transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penggunaan dana pendidikan agar tepat sasaran dan bermanfaat optimal bagi peningkatan mutu layanan Pendidikan. Prinsip pengelolaan keuangan dalam perspektif umum dan Islam memiliki kesamaan dalam penekanan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas, namun berbeda dalam landasan filosofis dan tujuan. Pengelolaan umum keuangan berfokus pada regulasi negara dan peningkatan kualitas layanan publik, sedangkan dalam Islam

didasarkan pada nilai-nilai syariah dan bertujuan mencapai keberkahan serta ridha Allah SWT. Dalam Islam, pengelolaan keuangan tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhan, serta menghindari unsur-unsur haram seperti riba, gharar, dan maysir.

REFERENSI

- Abdillah, F. (2024). Peran Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Indonesia. *Educazione: Jurnal Multidisiplin*, 1(1), 13–24.
- Abhas, K. M. W. S. (2015). Analisis Konsep Amanah Sebagai Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Pada Yayasan (Studi Kasus Pada Yayasan La-Royba Bali Bina Insani Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 5(2), 18–30.
- Afkari, S. G. (2025). Manajemen Risiko Dalam Keuangan Lembaga Pendidikan: Strategi Mitigasi, Transparansi Anggaran, Dan Keberlanjutan Finansial. *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 3(4), 18–25.
- Ahyani, E., & Dhuhani, E. M. (2024). Transformasi Digital Dalam Manajemen Perkantoran Pendidikan: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Visionary: Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*, 12(1), 205–215.
- Anwar, H., Rihfenti Ernayani, S., Ak, M., Taufik, M. I., Se, M., Subhan, M. N., Se, M., Evrina, S., Nasrullah Djamil, S., & Si, M. (2023). *Manajemen Pengelolaan Keuangan Syariah. Cendikia Mulia Mandiri*.
- Aryawati, N. P. A., Harahap, T. K., Yanti, N. N. S. A., Mahardika, I. M. N. O., Widiniarsih, D. M., Ahmad, M. I. S., Mattunruang, A. A., & Amali, L. M. (2023). Manajemen Keuangan. *Penerbit Tahta Media*.
- Atmajaya, E. U., Serly, S. A. P., Diska, S. N. G., & Arin, A. G. M. (2024). Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Journal Of Economics And Business*, 2(1), 133–143.
- Aziz, A., Nafi, A., Utami, E. Y., Anurogo, D., Kurniawan, M. A., Alwi, R., & Riva'i, F. A. (2023). *Manajemen Pendidikan Islam: Filosofi, Konsep Dasar, Dan Implementasi Praktis*. Pustaka Peradaban.
- Deski, C. W. (2024). *Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Masjid Dalam Perpektif Islam (Studi Pada Masjid Ad-Du'a Kota Bandar Lampung)*.
- Diantari, S. D., Bani, M. S. O., Al Fatiqh, S., & Trihantoyo, S. (2024). Pengoperasian Aplikasi Rkas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos). *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(2), 280–299.
- Dr Ha Rusdiana, M. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Filosofi, Konsep, Dan Aplikasi*. Tresna Bhakti Press Bandung.
- Fadhilah, N. (2023). Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 9(1), 30–45.
- Hastuti, S. P., & Fitriani, M. I. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Melalui Literasi Keuangan Di Sd Negeri Tanak Embang. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(3), 2145–2153.
- Hidayat, R., Alam, M., Halim, A. S., & Agustian, S. (2023). Efektivitas Dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan Pasca Covid-19. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2), 228–241.
- Iman, M., Ida Ayu, H. E., Yanti Yunita, E. S., Wagimin, W., Tamimi, M., Ulian Burju, S., Zoe Zarka, S., Anri, N., Yurini, L., & Handoko, H. (2024). *Manajemen Pendidikan Teori Dan Praktik Dalam Sistem Pendidikan*.
- Jasmine, S. F. (2023). Analisis Manajemen Keuangan Sdn Kandangan Iii Surabaya. *Jurnal*

- Jendela Pendidikan*, 3(02), 231–240.
- Kadir, A. (2019). *Implementasi Sistem Informasi Dan Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Simpatika) Dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah (Di Kantor Kementerian Agama Kota Binjai)*.
- Komariah, K., Safrizal, M. A., & Suhendi, D. (2023). *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan Islam Kajian Teoritis Dan Implementatif*.
- Majid, M. A. (2023). Problematika Pendidikan Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(1), 58–69.
- Muchlis, S., Mais, R. G., & Hartono, A. (2022). Manajemen Keuangan Berbasis Penerapan Nilai-Nilai Profetik. *Musyarakah: Journal Of Sharia Economic (Mjse)*, 2(1), 1–21.
- Nafiuddin, N. (2019). Memahami Sifat Shiddiq Nabi Muhammad Saw Perspektif Bisnis Syariah. *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 6(2), 116–126.
- Najihah, I., & Muhammad, S. H. (2021). Konsep Manajemen Keuangan Dalam Lembaga Pendidikan Islam Perspektif Al Qur'an Dan Hadis. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(2), 223–239.
- Nisa, V., Rachmawati, A. A., Janah, E. U., & Trihantoyo, S. (2024). Analisis Prinsip Akuntabilitas Manajemen Berbasis Sekolah (Mbs) Dalam Mendukung Pengelolaan Keuangan Sekolah. *Refleksi: Jurnal Riset Dan Pendidikan*, 2(2), 69–82.
- Rahayu, S. (2019). Praktik Pengawasan Pengelolaan Keuangan Sekolah. *Jaku (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)(E-Journal)*, 4(1), 15–23.
- Rahayuningsih, S. (2021). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos). *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 1(2), 110–117.
- Rahmah, N. (2016). Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah. *Kelola: Journal Of Islamic Education Management*, 1(1), 73–77.
- Rahmatilla, F. Y., & Ali, A. H. (2024). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Perspektif Akuntansi Syari'ah Di Masjid Nurul Anzor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. *Mazinda: Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis*, 2(2), 41–56.
- Rambe, A. Y. F., & Herlambang, S. (2022). Manajemen Keuangan Syariah. *Qusqazah*, 1(2), 38–48.
- Rianti, I. (2025). Peningkatan Kreativitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pembiayaan Program Desa Maju Inhil Jaya (Dmij) Plus Terintegrasi. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5(2), 63–70.
- Ritonga, P. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas: Peran Audit Dalam Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 13(2), 323–336.
- Sa'adah, S., Waluyo, B., & Sayuti, A. (2025). Kepemimpinan Pendidikan Islam: Konsep, Gaya, Dan Implikasinya. *Unisan Jurnal*, 4(2), 01–09.
- Salam, N. (2024). *Best Practice Dalam Pengelolaan Dana Bosp Dengan Menerapkan Prinsip Manajerial Kepala Sekolah*. Nas Media Pustaka.
- Setiawan, I. (2021). Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Syari'ah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (Aksy)*, 3(2), 153–170.
- Sihotang, E. T., & Yutanto, H. (2021). Tata Kelola Organisasi Mahasiswa Melalui Pengembangan Sistem Informasi. *Matrik: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer*, 21(1), 99–110.
- Sudaryo, A. (2024). Dinamika Pendidikan Islam Di Indonesia. *Interdisiplin: Journal Of Qualitative And Quantitative Research*, 1(1), 1–9.
- Sumarsono, R. B., Maisyaroh, M., Untari, S., & Chusniyah, T. (2021). Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah, Guru, Dan Tenaga Administrasi Sekolah Dalam Mengelola Keuangan

- Berbasis Teknologi Informasi. *Abdimas Pedagogi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 105–112.
- Trisnawati, E., Wahab, A., & Habbe, H. (2021). *Implementasi Etika Berdagang Dengan Sifat Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathanah Pada Waroeng Steak And Shake Cabang Boulevard Makassar*.
- Tuu, M. R., Aneta, Y., & Tui, F. P. D. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Blu) Melalui Sistem Informasi Rencana Bisnis Anggaran (Rba) Di Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo. *Normalita (Jurnal Pendidikan)*, 11(3).
- Untung, S. (2023). Manajemen Keuangan Pendidikan Islam. *Khazanah Pendidikan*, 17(2), 130–138.
- Usman, H. (2021). *Administrasi, Manajemen, Dan Kepemimpinan Pendidikan: Teori Dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Zahroh, F., & Ryandono, M. N. H. (2015). Nilai Fathonah Dalam Pengelolaan Bisnis Di Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2(9), 745–758.

Copyright holder :

© Author

First publication right:

Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah

This article is licensed under:

